

Mengkader Mahasiswa Pejuang Anti-Mafia Peradilan

Nasib KPK Kini dan Tugas Menjadi Mahasiswa Ulil Albab

Adv. Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Guru Besar HTN – Senior Partner INTEGRITY Law Firm

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang
SYDNEY, 22 September 2021

Terms of Reference
Welcoming Student "Mengapa KPK ku kini?"



- 1. Korupsi di Masa Bencana**
- 2. KPK is Dead!**
- 3. Mahasiswa Hukum dan Memberantas Mafia Peradilan**

OUTLINE





FIGHT AGAINST CO(VID-19)RRUPTION!



Kondisi Pandemi Covid-19 yang Sempat Melonjak Tinggi, Membuat Pemerintah meningkatkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional 2021

(Sumber: Kontan.co.id)

Rp 744,75 T

Pembiayaan program “**pemulihan ekonomi nasional**”

Rp 214,95 T

Program Kesehatan

Rp 187 T

Perlindungan Sosial

Rp 161,2 T

Insentif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha Rakyat

KORUPSI BENCANA SALAH SATU UPAYA MEMBUNUH DEMOKRASI

DALAM SITUASI
DARURAT/BENCANA SEKALIPUN
RULE of LAW HARUS TETAP
DIHORMATI, JIKA TIDAK MAKA
TERENGGUTLAH DEMOKRASI

“

An emergency is **not a blank check** to decide just anything. Emergency measures must respect the rule of law, freedoms and basic rights.

Delia Ferreira Rubio,
Chair of Transparency International



“

The scale of the crisis raises the risks and dangers of **the theft of public money** that should be used to **save lives** and **rebuild livelihoods**.

Delia Ferreira Rubio,

Chair of Transparency International



**TRANSPARENCY
INTERNATIONAL**
the global coalition against corruption



FAKTOR YANG MENINGKATKAN POTENSI KORUPSI DALAM SITUASI BENCANA

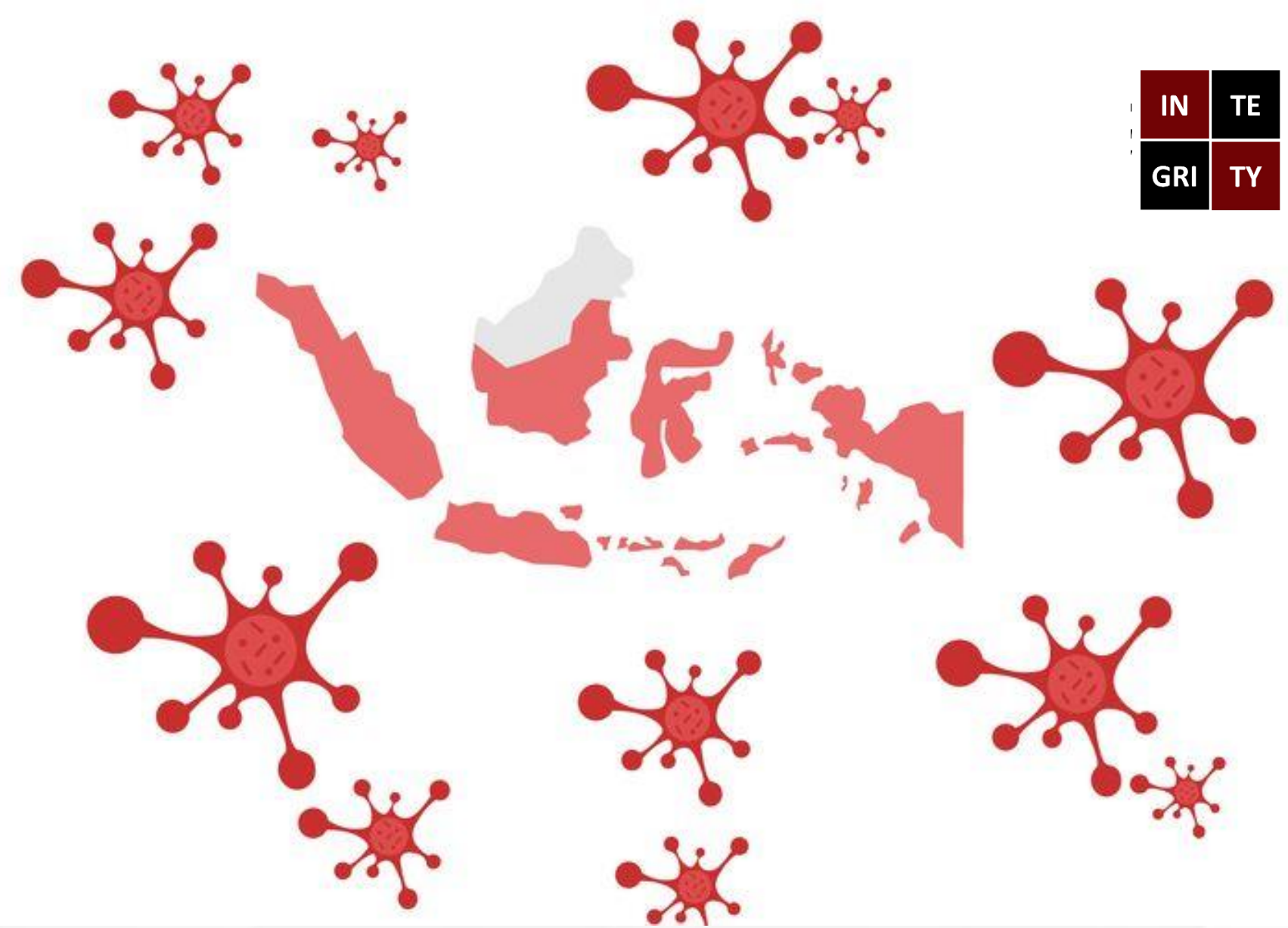
- Lemahnya **PENGAWASAN** pada situasi bencana
- Diskresi (dalam hal ini **KELELUASAAN PEMERINTAH** dalam melakukan penunjukan langsung pengadaan bantuan)

Indonesia Corruption Watch, 2019

KORUPSI DANA BANSOS

Pasal 2 ayat (2) UU 31/1999

“Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”



COVID-19 SEBAGAI BENCANA NASIONAL!

Keppres No. 12/2000 tentang Penetapan Bencana Non-Alam

Juliari Batubara Divonis 12 Tahun Penjara Terkait Korupsi Bansos Covid-19

Koruptor COVID-19 Merajalela: Aparat Desa,
Bupati, sampai Menteri

Rabu 10 Maret 2021, 09:15 WIB

Kejari Purwokerto Bongkar Korupsi Bantuan Covid-19 Senilai Rp1,9 M

Lilik Darmawan | Nusantara

Home > Nasional

KPK Periksa Bupati Bandung Barat Terkait Kasus Korupsi Bansos Covid-19

Senin, 26 Juli 2021 | 13:31 WIB

Oleh : Fana F Suparman / JAS

Vonis Juliari Batubara: Diringankan karena cacian publik, 'keberpihakan hakim untuk pelaku atau korban pandemi?'

24 Agustus 2021



**TIPIKOR DALAM SITUASI BENCANA
DAPAT DIJATUHKAN
HUKUMAN MATI**



“Runtuhnya Wacana Pidana Mati Korupsi Bansos”

“Ingat, ancaman hukuman mati koruptor anggaran bencana dan proses pengadaan darurat bencana” – Firli Bahuri, 27 Maret 2020

Pernyataan Ketua KPK yang dinilai sesumbar tentang penggunaan pidana mati kasus korupsi di masa pandemi



“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 11 tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan” - tuntutan Jaksa di PN Tipikor pada 28 Juli 2021

KPK menggunakan Pasal 12 UU No. 31/1999, bukan Pasal 2. Meskipun demikian, sesungguhnya Pasal 12 membuka peluang bagi jaksa untuk menuntut penjara seumur hidup kepada JPB



“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 tahun dan pidana denda sejumlah Rp500 juta” – Putusan Hakim PN Tipikor pada 23 Agustus 2021

Pukat UGM menilai hakim dalam perkara korupsi Bansos JPB sedang bermain aman dengan memberikan putusan karena hakim memiliki kesempatan memberi hukuman lebih berat

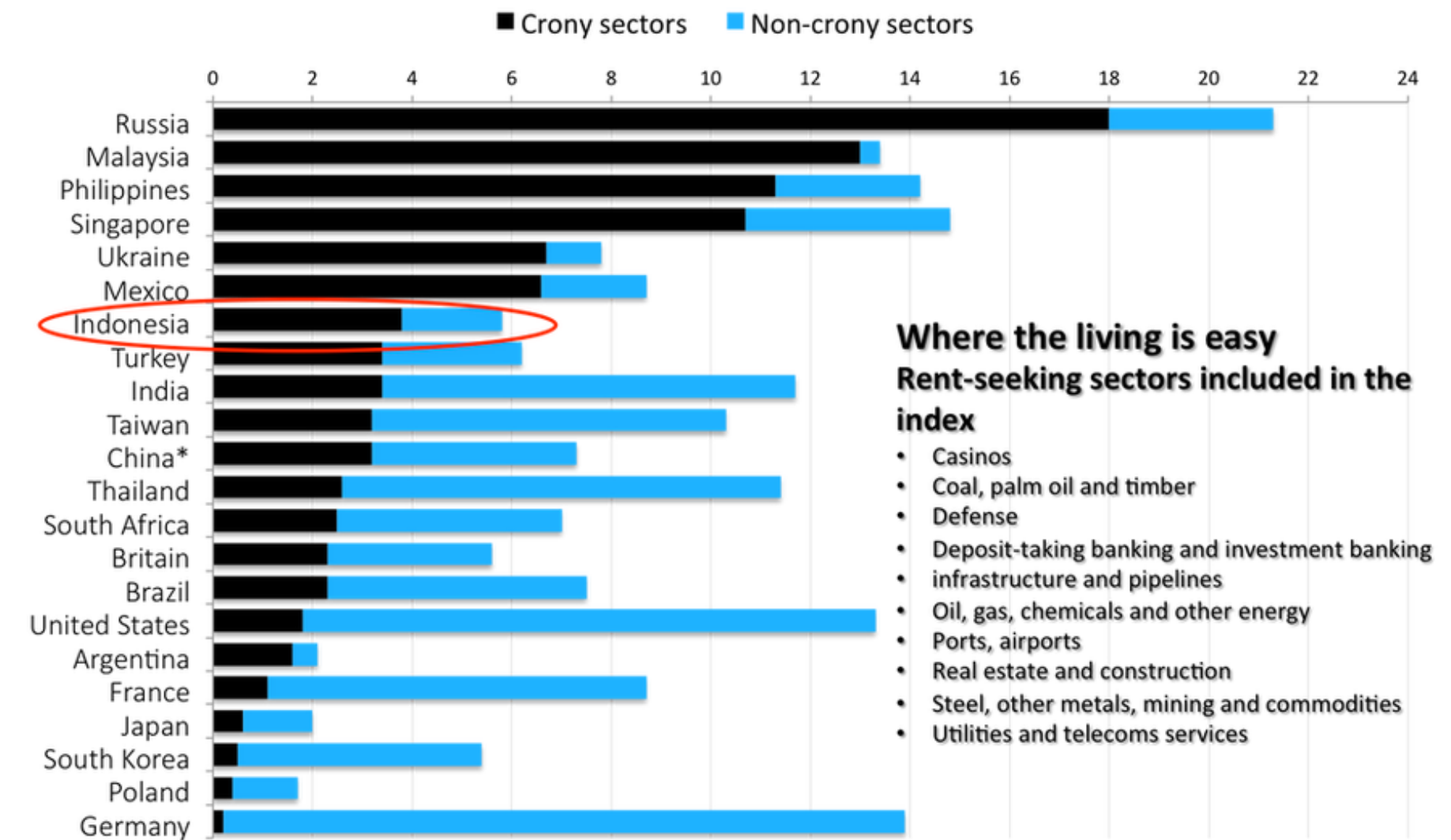
Sistem Politik yang Koruptif

- Pendanaan Politik
- Pendanaan Kampanye

Bisnis yang kolusif antara Pemerintah dengan Pengusaha

The crony-capitalism index

Billionaire wealth as a % of GDP, ranked by crony-sector wealth, 2016



Where the living is easy
Rent-seeking sectors included in the index

- Casinos
- Coal, palm oil and timber
- Defense
- Deposit-taking banking and investment banking
- infrastructure and pipelines
- Oil, gas, chemicals and other energy
- Ports, airports
- Real estate and construction
- Steel, other metals, mining and commodities
- Utilities and telecoms services

*Includes territories.

Source: The Economist, Daily chart: Comparing crony capitalism around the world (<http://econ.st/24zXocy>).

**Oligarch: Penguasa berpilin
dengan pengusaha**

Parpol yang Koruptif

Media yang Terkooptasi

Oknum Aparat Keamanan

The Real Power Holders

Oligarchs, Media Control and Elections

- Major media groups own five out of six Indonesian newspapers with the highest circulation, and all four biggest online news media sites. Further, ownership of TV stations is concentrated in five corporations that control 96.6% of all national stations.
- The parties become vulnerable to and dependent on oligarchs – a wealthy individual or conglomerates who dominate Indonesia political parties.



DUITOCRACY KILLS
INDONESIA'S DEMOCRACY

KPK, NASIBMU KINI

STRONGER KPK: FROM LEGAL PERSPECTIVE

1. **Constitutional Organ**
2. **A Better commissioners' selection system**
3. **Limited Immunity for commissioners and staff**
4. **Independent staff, including investigative officer**
5. **More Budget**
6. **More Powers, or at least the same**
7. **Representative Office**
8. **A better supervision system**



STRONGER KPK: FROM LEGAL PERSPECTIVE



1. Constitutional Organ
2. A Better commissioners' selection system
3. Limited Immunity for commissioners and staff.
4. Independent staff, including investigative officer
5. More Budget
6. More Powers, or at least the same
7. Representative Office
8. A better supervision system

KPK is the strongest anticorruption agency in Indonesia's history

THE KILLING
NEVER STOP



(Kartun Majalah Tempo, 12-18 Oktober 2015)

■ KPK vs Polisi

**“KRIMINALISASI”
GECKO VS CROCODILE**



PHYSICAL ATTACK



Balada Angkot Angket KPK

Oleh DENNY INDRAYANA

Apa hubungan antara hak angket yang diangkat DPR atas KPK dan transportasi angkot yang mengangkut penumpang kota? Sejujurnya, tak ada. Ini hanya susunan kata agar menarik menjadi judul dan enak dibaca. Lalu kenapa ang-

melihat sepotong ketentuan Pasal 79 Ayat 3 UU MD3 bahwa angket ditujukan untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang, dalam hal ini UU KPK. Lebih jauh, para pendukung angket berpendapat pimpinan KPK sebagai pejabat negara tidak menjalankan rekomendasi hasil rapat kerja dengan Komisi Hukum DPR (Pasal 98 Ayat 7 UU MD3)

Penjelasan Pasal 3 mengatur: "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan 'kekuasaan mana pun' adalah kekuatan yang dapat memengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun de-

dan/atau menyerahkan dokumen—termasuk BAP pemeriksaan Miryam Haryani. Pihak yang tidak memenuhi panggilan panitia angket dapat dikenai hukuman sandera meskipun paling lama hanya 15 hari. Berbeda dengan hak angket kepada kebijakan pemerintah yang dapat berujung dengan pemakzulan presiden, akhir dari angket DPR atas KPK ini tidak terlalu jelas

berantasan korupsi dan mengangkut angket DPR. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya dibela dan dilindungi, atau lebih tepatnya, siapa dan mengapa?

DENNY INDRAYANA
Guru Besar Hukum Tata Negara UGM; Profesor Tamu di Melbourne Law School dan Faculty of Arts University of Melbourne, Australia

INQUIRY
RIGHT:
THE
NEW
M.O.



Pembunuhan KPK Secara Terstruktur

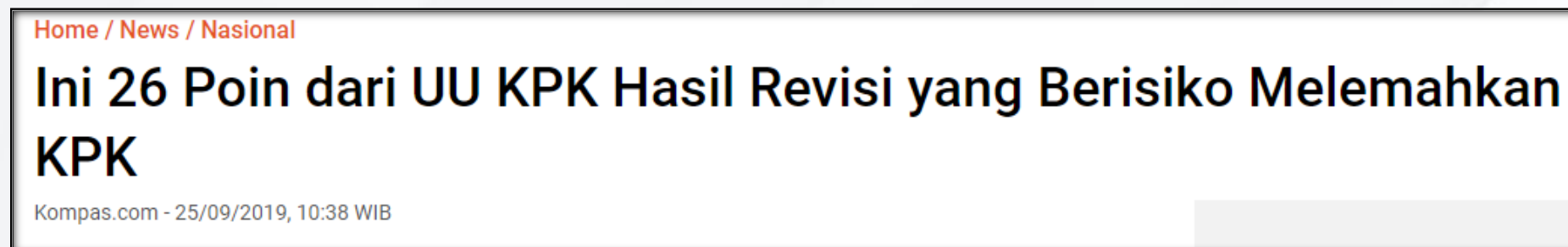
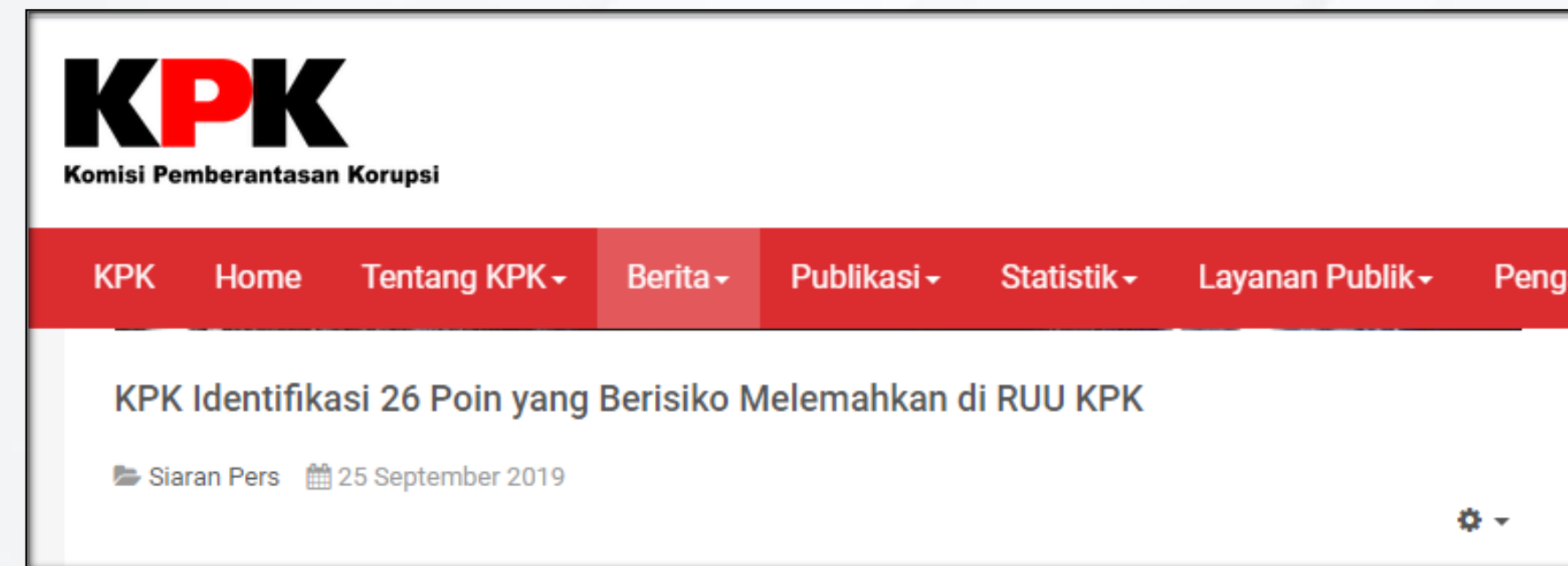
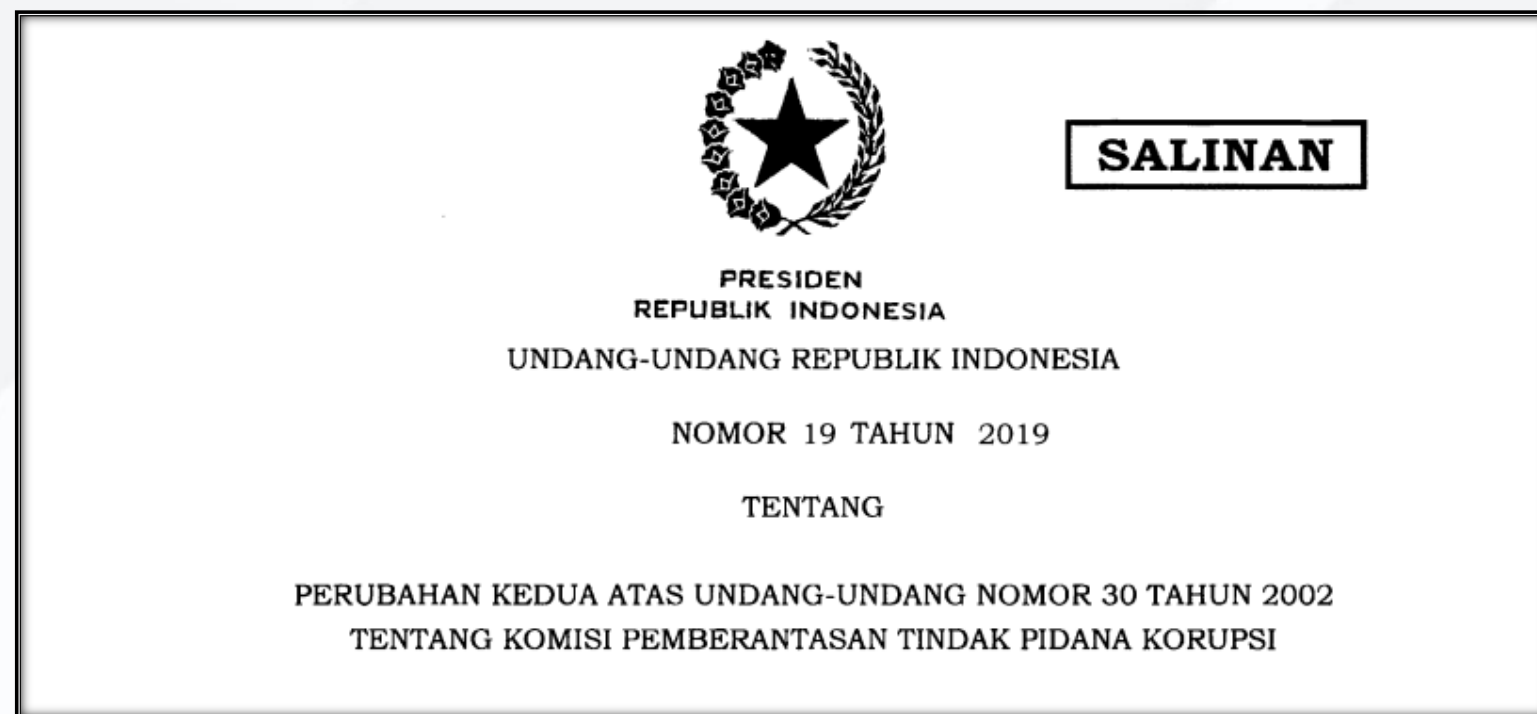
<http://www.integritylawfirm.id/buku/>

denny@integritylawfirm.id

Don't
Kill
KPK
Corruption Eradication Commission



Melalui Revisi UU KPK, Ada Pelumpuhan KPK



- 26 Pelemahan KPK di dalam UU 19/2009
- Presiden berdiri di dua kaki, tidak menandatangani UU 19/2019 padahal ikut andil dalam persekongkolan jahat

Krisis Etika Pimpinan KPK



2 Orang Pimpinan KPK Melanggar Kode Etik

Dewas Putuskan Ketua KPK Firli Bahuri Langgar Kode Etik!

Tim detikcom - detikNews

Kamis, 24 Sep 2020 10:23 WIB

CNBC Indonesia > News > Berita

Tercoreng! Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Langgar Kode Etik

NEWS - dob, CNBC Indonesia | 30 August 2021 12:55

Menyingkirkan Pegawai KPK yang Berintegritas

- Melalui Tes Wawasan Kebangsaan, 51 pegawai KPK diberhentikan. Awalnya berjumlah 75, 24 diantaranya dinilai masih bisa dibina;
- Diantaranya Novel Baswedan, Giri Suprapdiono, Sujanarko dan Harun Al Rasyid;
- Ombudsman Republik Indonesia menemukan pelanggaran dalam TWK;
- Komnas HAM menilai pemberhentian pegawai KPK merupakan pelanggaran HAM.

Home > News > Nasional

51 Pegawai KPK Diberhentikan per 1 November 2021

Selasa 01 Jun 2021 13:24 WIB

Rep: Mimi Kartika/ Red: Indira Rezkisari

NASIONAL

Dugaan Persekongkolan Menyingkirkan Pegawai KPK

Sejumlah pemimpin lembaga negara diduga berada di balik pengusuran 75 pegawai KPK. Sebagian pegawai merupakan penyidik yang tengah mengusut kasus besar yang melibatkan elite partai politik.

EDISI, 9 JUNI 2021

Novel Baswedan: Ada Agenda Singkirkan Pegawai KPK yang Baik

CNN Indonesia | Rabu, 26/05/2021 19:53 WIB

PENURUNAN KINERJA KPK

Grafik Penanganan Perkara

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Penyelidikan	96	123	164	142	111	41
Penyidikan	99	121	199	145	91	22
Penuntutan	76	103	151	153	75	34

Diolah dari <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/109-statistik>

Institusi	Tingkat Kepercayaan Publik
Kepolisian	86,2%
Mahkamah Agung	85,9%
Kejaksaan Agung	82,2%
KPK	80,7%

Survei Cyrus Network 22 Juni 2021 diperoleh dari [cnn.com](https://www.cnn.com)



ASPEK PEMBERANTASAN KORUPSI

Perkembangan Index Ketidadaan Korupsi Indonesia

Tahun	Peringkat	Skor
2015	74	0,37
2016	84	0,38
2017	90	0,37
2018	90	0,37
2019	97	0,38
2020	92	0,39

Upaya menciptakan Indonesia yang bebas korupsi juga mengalami tren penurunan. Pada tahun 2015, Indonesia menempati peringkat 74 indeks ketidadaan korupsi. Turun 18 peringkat menjadi rank 92 di tahun 2020.

SUMBER: WORLD JUSTICE PROJECT 2020

INDEKS PERSEPSI KORUPSI



SUMBER: TRANSPARENCY INTERNATIONAL 2020

Score	Country	Rank	
36	Indonesia	88	2015
37	Indonesia	96	2016
37	Indonesia	90	2017
38	Indonesia	89	2018
40	Indonesia	85	2019
37	Indonesia	102	2020



What Next? Solusi

Putus hubungan kolusif penguasa dan pengusaha

Penguasa harus lebih independen dari kepentingan bisnis

Penegakan hukum harus lebih tegas

Mafia hukum harus diberantas

KPK harus diperkuat, bukan diperlemah, apalagi dimatikan



HAKIM KORUPSI

5 KRITERIA ULIL ALBAB - Jalaluddin Rahmat

1. Kesungguhan mencari ilmu dan kecintaannya **mensyukuri nikmat** Allah (QS. Ali Imran: 190)
2. Memiliki kemampuan **memisahkan sesuatu dari kebaikan dan keburukan**, sekaligus mengarahkan kemampuannya untuk memilih dan mengikuti kebaikan tersebut (QS. Al-Maidah:100)
3. **Bersikap kritis** dalam menerima pengetahuan atau mendengar pembicaraan orang lain, memiliki kemampuan menimbang ucapan, teori, proposisi dan atau dalil yang dikemukakan orang lain (QS. Al-Zumar: 18)
4. Memiliki kesediaan untuk **menyampaikan ilmunya kepada orang lain**, memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki masyarakat serta terpanggil hatinya untuk menjadi pelopor terciptanya kemaslahatan dalam masyarakat (QS. Ibrahim: 52 dan al-Ra'd: 19-24)
5. Merasa **takut hanya kepada Allah** (QS. Al-Baqarah: 197 dan al-Thalaq: 10)



ULIL ALBAB

Dua Sisi Saling Melengkapi

IMTAQ - IPTEK
SOFT SKILL - HARD SKILL



As a Law degree holder, you can become an attorney or build a career beyond lawyering.

TAKE ANY OF THESE UNIQUE JOBS FOR LAW GRADUATES



Associate Director
Of A Bar Review
Corporation



Healthcare
Marketing Director



Law Professor



Law Firm
Administrator



Associate
Publisher



Law Librarian



Civil Rights
Investigator



Law School Career
Counselor



Paralegal
Instructor

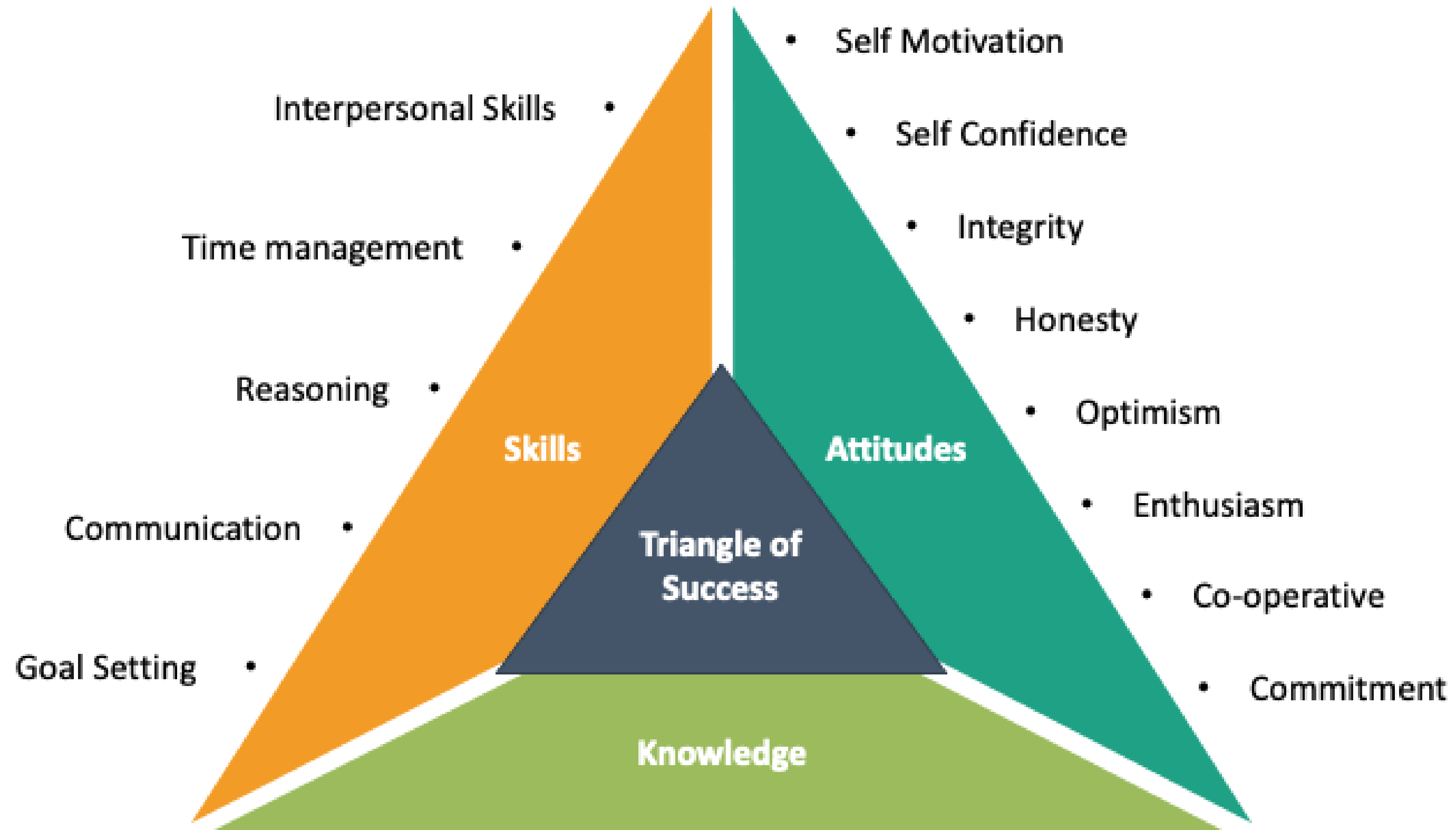
What can you do with a law degree?

SKILLS REQUIRED TO BECOME A SUCCESSFUL LAWYER

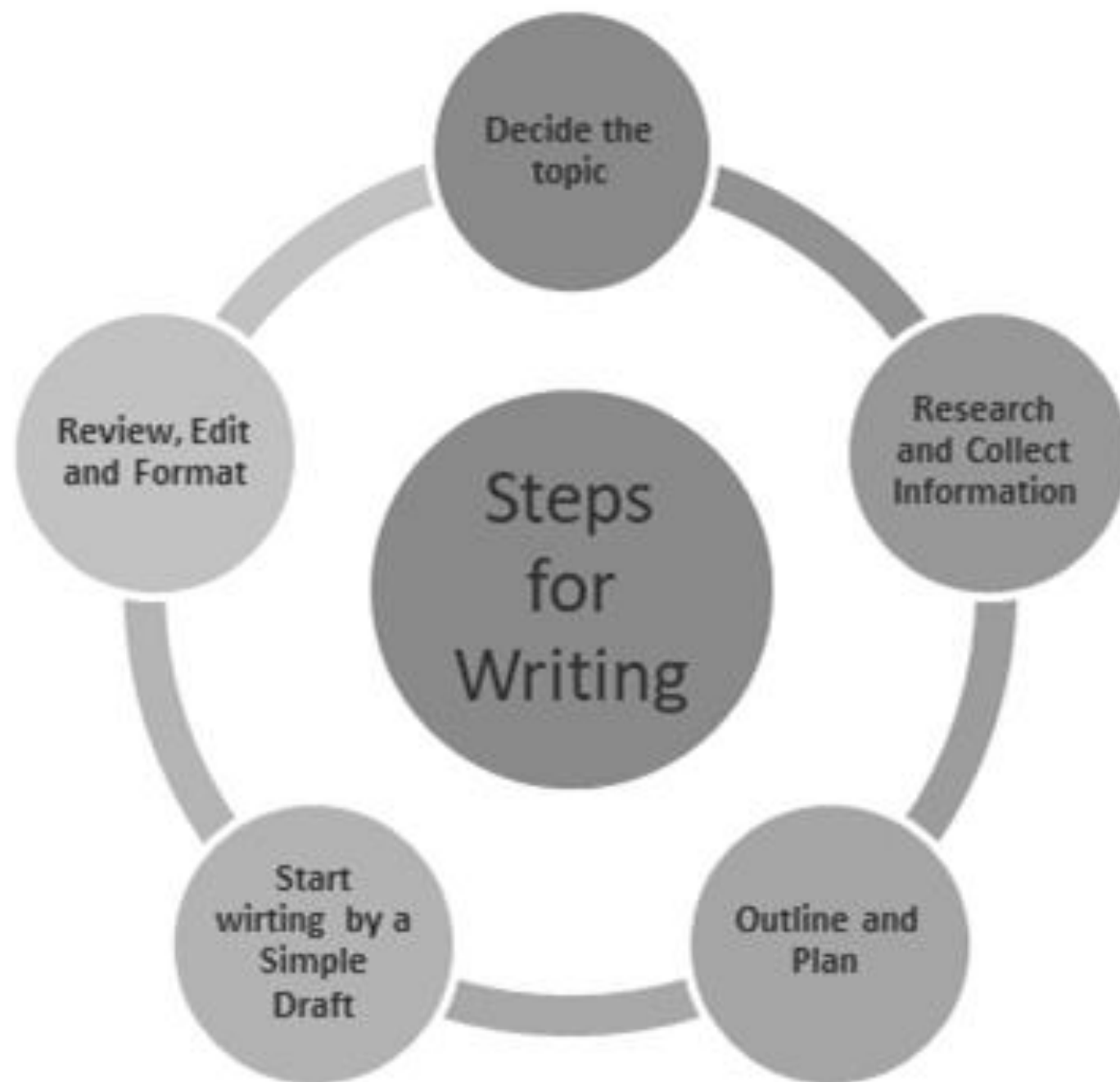


LEGAL KNOWLEDGE
PENGUASAAN ILMU HUKUM DASAR

KNOWLEDGE SKILLS ATTITUDE



Basics, Theories, Information, Facts, Figures,
Descriptions, Learning, Science, etc.



a. Banyak Membaca

b. Membaca, Diskusi, Menulis

c. Drafting Skill banyak Bermasalah

d. Perbanyak Workshop *Legal Writing*

e. Ikuti kompetisi penulisan dan penelitian

Writing Skill



- a. Attitude
- b. Convincing
- c. Speaking Skill
- d. Juara Debat Konstitusi
- e. Perbanyak ikut kompetisi yang mengasah Logika pikir
- f. Jadilah aktivis – ORGANISASI!!!

Negotitation Skill



- a. Jejaring penting
- b. Marketing skill

**Apalagi, kantor sendiri.
Tidak bisa jadi partner,
tanpa marketing skill**

NETWORKING

INTEGRITY

**TIDAK TERBELI !
NO Mafia Hukum !**



“Integrity is doing
the right thing,
even when no one
is watching.”

C. S. Lewis

INTEGRITY Programs

- INTEGRITY Scholarship
- INTEGRITY Constitutional Discussion
- INTEGRITY Legal Training
- INTEGRITY Legal Update
- INTEGRITY Constitutional Advocacy

Usulan Solusi terkait Over Kapasitas di Penjara
 Adv. Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
 Wakil Menteri Hukum dan HAM (2011—2014)
 Senior Partner INTEGRITY Law Firm

Problematika & Solusi Hukum atas Seleksi Anggota BPK
 Adv. Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
 Zamrony, S.H., M.Kn., CRA.
 Muhamad Raziv Barokah, S.H., M.H.

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #2

URGENSI AMANDEMEN KONSTITUSI DI TENGAH PANDEMI: UNTUK KEPENTINGAN SIAPA?

KEYNOTE SPEAKER

Moh. Mahfud MD
Menkopolkam RI

NARASUMBER

Yudi Latief
Ketua PSIK Indonesia

Arsul Sani
Wakil Ketua MPR RI

MODERATOR

M. Raziv Barokah
Senior Lawyer INTEGRITY Law Firm

Bivitri Susanti
Akademisi STHI - Jentera

Denny Indrayana
Guru Besar HTN
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

FREE REGISTRASI!
 Link Pendaftaran : bit.ly/INTEGRITYCD2
 Tersedia e-certificate

Kamis, 26 Agustus 2021
 Pukul 13.00 WIB - Selesai
 Live on Zoom & YouTube INTEGRITY Law Firm

Kunjungi kami di www.integritylaw.id

Narahubung : Febry Sitorus 081260667127

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #3

PRO-KONTRA TIGA PERIODE MASA JABATAN PRESIDEN

KEYNOTE SPEAKER

Denny Indrayana
Guru Besar HTN
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

NARASUMBER

Moh. Qodari
Penggagas Komunitas Juk-Pro
Direktur Eksekutif Indo Barometer

Refly Harun
Pakar Hukum Tata Negara

MODERATOR

Wafdah Zikra Yuniarsah
Lawyer INTEGRITY Law Firm

Titi Anggraini
Dewan Pembina Perludem

Tim Lindsey
Profesor Melbourne Law School,
Australia

Jumat, 17 September 2021
 Pukul 13.30 WIB - Selesai
 Live on Zoom & YouTube INTEGRITY Law Firm

FREE REGISTRASI!
 Link Pendaftaran : bit.ly/INTEGRITYCD3

Kunjungi kami di www.integritylaw.id

Narahubung : Febry Sitorus 081260667127

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION

PHK & ISU KETENAGAKERJAAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19: Antisipasi & Solusi Hukumnya

NARASUMBER

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Guru Besar HTN & Senior Partner INTEGRITY

Dra. Indah Anggoro Putri, M.Bus.
Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial
dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Faisal H. Basri, S.E., M.A.
Ekonom Senior

MODERATOR

Abdulatif Zainal, S.H.
Lawyer INTEGRITY

Kamis, 12 Agustus 2021
 Live on Zoom, 13.00 - 16.00 WIB

DAFTAR SEKARANG!
 Link Pendaftaran : bit.ly/IntegrityCD1

FREE

Narahubung : Sabila Rusdhina (0812-8930-8378)

Kunjungi kami di www.integritylaw.id

<https://www.integritylawfirm.id/category/program/integrity-scholarship/>

INTEGRITY INTERNSHIP

[https://www.integritylawfirm.id/
2021/09/16/lowongan-
internship-integrity-law-firm/](https://www.integritylawfirm.id/2021/09/16/lowongan-internship-integrity-law-firm/)

INTEGRITY IN TE
INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNMENT,
CONSTITUTION, AND SOCIETY GRI TY



LOWONGAN INTERNSHIP

SYARAT:

1. Mahasiswa tingkat akhir atau Sarjana Hukum (*fresh graduate*)
2. Memiliki pengalaman organisasi dan aktivis mahasiswa (lebih diutamakan)
3. Memiliki logika hukum, kemampuan bicara dan menulis yang meyakinkan
4. Menguasai bahasa inggris baik lisan maupun tulisan
5. Memiliki kemampuan mengoperasikan Microsoft Office

Link Pendaftaran: bit.ly/INTEGRITYINTERNSHIP

Pendaftaran Ditutup 30 September 2021



Citylofts Sudirman, Suite 1226 Lantai 12
Jl. K.H. Mas Mansyur No. 121
Jakarta 10250



www.integritylawfirm.id



@integrity_lawfirm



INTEGRITY Law Firm



@integrity_lawfrm



INTEGRITY SCHOLARSHIP 2021
PENGUMUMAN TECHNICAL MEETING

Calon peserta seleksi penerima beasiswa *Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Scholarship*, yaitu para mahasiswa Fakultas Hukum tingkat akhir yang memenuhi syarat, diundang **wajib** mengikuti *technical meeting* pada **Rabu, 6 Oktober 2021, Jam 10 WIB**, melalui *zoom meeting*.

Pendaftaran *technical meeting* silakan dengan mengklik formulir yang tersedia pada:
<http://www.integritylawfirm.id/2021/09/18/pendaftaran-technical-meeting>.

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

www.integritylaw.id [@integrity_lawfirm](https://www.instagram.com/integrity_lawfirm) [integritylawfirm](https://www.facebook.com/integritylawfirm) [integritylawfirm](https://www.youtube.com/channel/UCv8s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8) [integrity_lawfirm](https://www.linkedin.com/company/integrity-law-firm)



Panduan Umum
INTEGRITY Scholarship

Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society



Pendaftaran INTEGRITY
Scholarship

Untuk dokumen formulir surat pendaftaran

Pendaftaran Technical Meeting Beasiswa (INTEGRITY Scholarship)



INTEGRITY SCHOLARSHIP 2021
PENGUMUMAN TECHNICAL MEETING

Calon peserta seleksi penerima beasiswa *Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Scholarship*, yaitu para mahasiswa Fakultas Hukum tingkat akhir yang memenuhi syarat, diundang **wajib** mengikuti *technical meeting* pada **Rabu, 6 Oktober 2021, Jam 10 WIB**, melalui *zoom meeting*.

Pendaftaran *technical meeting* silakan dengan mengklik formulir yang tersedia pada:
<http://www.integritylawfirm.id/2021/09/18/pendaftaran-technical-meeting>.



Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

www.integritylaw.id [@integrity_lawfirm](https://www.instagram.com/integrity_lawfirm) [integritylawfirm](https://www.facebook.com/integritylawfirm) [INTEGRITY Law Firm](https://www.youtube.com/channel/UCv8s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8) [@integrity_lawfirm](https://www.linkedin.com/company/integrity-law-firm)

INTEGRITY Scholarship

<https://www.integritylawfirm.id/category/program/integrity-scholarship/>



Visit  at:

<http://www.integritylawfirm.id>



We are the INTEGRITY



LITIGATION | CONSULTATION | RESEARCH

INTEGRITY

INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNMENT,
CONSTITUTION, AND SOCIETY

